INDONESIA CORRUPTION WATCH

LAPORAN TAHUNAN 2020

INDONESIA CORRUPTION WATCH

INDONESIA CORRUPTION WATCH

INDONESIA CORRUPTION WATCH

KATA PENGANTAR

KORUPSI DAN PANDEMI

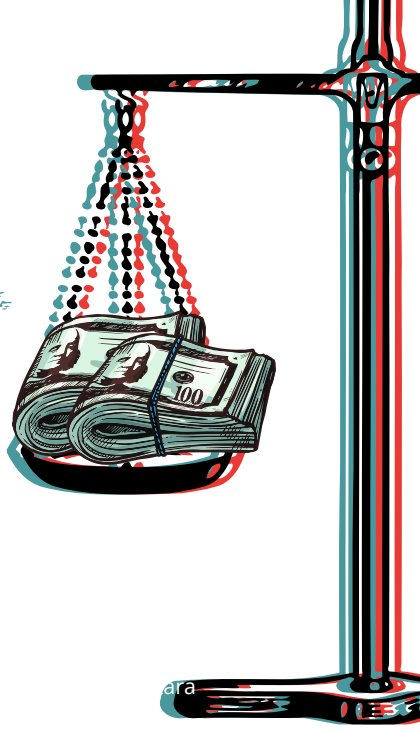

Laporan tahunan ICW periode 2020 ini terbit dalam situasi pandemi COVID-19, dimana ancaman korupsi lebih besar dibandingkan saat kehidupan normal. Mengapa korupsi meningkat saat pandemi? penjelasannya sederhana. Pemerintah menggelontorkan anggaran yang sangat besar, hampir mencapai Rp 700 triliun pada 2019 untuk menanggulangi pandemi dan dampaknya, namun hampir semua proses belanja dan penggunaan uangnya dilakukan secara darurat. Artinya, prosedur yang biasanya diterapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas sektor publik tidak berlaku pada situasi darurat karena prioritasnya adalah respon cepat atas situasi genting.

Pada saat yang sama, sistem antikorupsi yang relatif baik yang Indonesia pernah punya, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dilemahkan melalui terbitnya UU No 19 Tahun 2019, sebagai revisi atas UU No 30 Tahun 2002. Hasil dari kebijakan revisi ini juga langsung dirasakan, karena skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2020 anjlok drastis, menjadi hanya 37, dari 40 pada tahun lalu. Sedangkan penguatan berbagai unit pengawas dan pendeteksi korupsi di sektor publik tidak kunjung dilakukan sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya korupsi yang lebih gawat.

Fungsi pengawasan sosial dalam konteks pandemi - yang selama ini dilakukan oleh masyarakat sipil dan jurnalis- menjadi sangat terbatas, terutama karena aktivitas lapangan tidak dapat dilakukan secara bebas. Berbagai mobilitas fisik dibatasi oleh regulasi untuk mencegah penyebaran COVID-19 sehingga kerja-kerja pengawasan masyarakat sipil lebih banyak mengandalkan sarana teknologi informasi dan internet. Sementara tekanan melalui sarana kriminalisasi menggunakan UU ITE kerap menjerat para aktivis maupun jurnalis dan kian meminggirkan fungsi kontrol sosial.

Kami di ICW juga merasakan dampaknya. Dengan bergantung pada internet, kerja pengawasan publik lebih sulit dilakukan. Hal ini karena tidak cukup informasi publik tersedia di berbagai sumber resmi pemerintah, bahkan data berbagai pengadaan penting untuk penanganan pandemi COVID-19 sangat tidak memadai. Terbatasnya saluran komunikasi membuat respon Pemerintah atas pertanyaan dan permintaan klarifikasi juga menjadi sangat lamban, seolah memanfaatkan situasi untuk menjauh dari pertanggungjawaban publik. Kerja pengawasan belanja penanggulangan pandemi COVID-19 oleh ICW dan sepuluh jaringan kerja di berbagai daerah berhadapan dengan masalah ini, karena nyaris tidak ada badan pemerintahan yang menyediakan informasi publik yang memadai.

Namun demikian, dengan berbagai tantangan diatas, ICW tetap berusaha melakukan fungsi watchdog, disamping terus membangun kerja antikorupsi melalui berbagai pendekatan. Salah satunya yang terpenting adalah penguatan masyarakat sipil antikorupsi. Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) yang biasanya dilakukan secara luring berubah menjadi full-online. SAKTI Papua dan SAKTI Papua Barat adalah 'korban' dari pandemi karena terpaksa dilakukan secara online. Meskipun anak-anak muda Papua dan Papua Barat yang telah mengikuti SAKTI tetap merasakan manfaatnya, namun kami merasa bahwa SAKTI dengan tatap muka akan lebih berdampak.

Kita semua tentu tidak ada yang tahu, kapan pandemi COVID-19 ini akan usai. Satu hal yang pasti, upaya penanggulangan COVID-19 dan dampaknya akan berjalan lebih lamban apabila sebagian besar anggarannya justru menguap karena dikorupsi oleh para pejabat publik tamak. Indikasinya sudah dapat kita temukan dimana-mana. Dalam konteks inilah, kerja ICW dan berbagai kelompok masyarakat sipil dalam mendorong tranparansi dan akuntabilitas sektor publik tetap dan menjadi lebih relevan.

Adnan Topan Husodo
Koordinator ICW

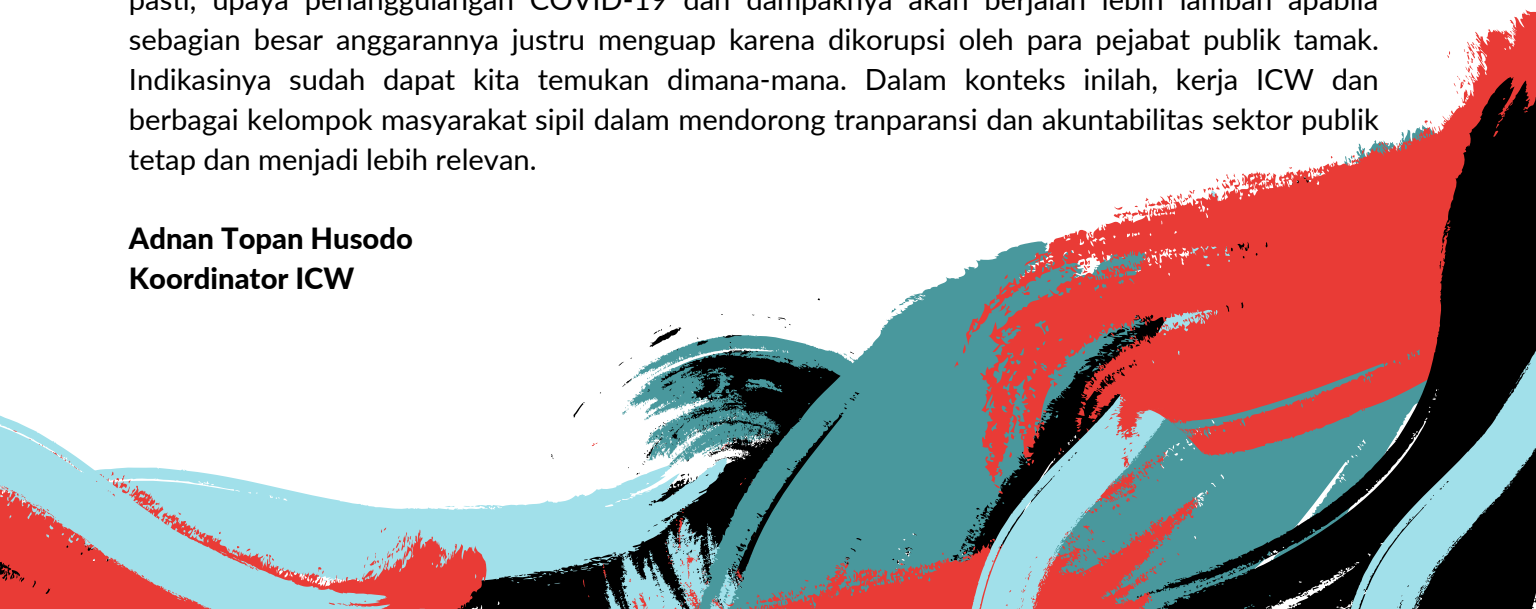

PENDAHULUAN

Secara garis besar, srategi utama ICW dalam mendorong gerakan anti-korupsi di Indonesia terbagi ke tiga pendekatan. **Pertama,** pengembangan dan penguatan internal ICW untuk menopang gerakan anti-korupsi yang lebih efektif. **Kedua,** penguatan jaringan anti-korupsi untuk memperluas usaha pemberantasan korupsi, baik pada dimensi masyarakat sipil, sektor publik maupun swasta. **Ketiga,** mendorong advokasi kebijakan publik agar lebih mendukung upaya pemberantasan korupsi di berbagai sektor, termasuk melawan berbagai upaya pelemahan anti-korupsi.

1. PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN INTERNAL ICW
2. PENGUATAN JARINGAN ANTI-KORUPSI UNTUK MEMPERLUAS USAHA PEMBERANTASAN KORUPSI
3. MENDORONG ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK

Berangkat dari tiga strategi tersebut, ICW telah mendorong berbagai inisiatif, mulai dari pengembangan instrument, metoda dan tool untuk melawan korupsi, penguatan kapasitas, usaha-usaha perlawanan hukum, penelitian dan investigasi, kampanye dan advokasi kebijakan publik, perluasan kerjasama dalam gerakan anti-korupsi dengan pemangku kepentingan, hingga pengembangan sumber pendanaan alternatif bagi organisasi dalam mencapai ketahanan keuangan.

Laporan ini dimaksudkan untuk menjelaskan lebih utuh apa yang telah dilakukan ICW dalam mendorong gerakan anti-korupsi di Indonesia selama kurun waktu 2020. Tak luput, berbagai tantangan yang dihadapi, sekaligus peluang baru yang tersedia untuk memperkuat gerakan anti-korupsi juga diceritakan agar pembaca memperoleh gambaran lebih besar atas kerja-kerja ICW selama ini.

Foto: Dokumentasi ICW

LAPORAN AKHIR TAHUN 2020
INDONESIA CORRUPTION WATCH

Jl. Kalibata Timur 4D No.6 Kalibata,
Jakarta Selatan

Telp	: 021-7901885 / 7994015
Fax	: 021-7994005
Website	: www.antikorupsi.org
	: www.opentender.net
	: www.akademi.antikorupsi.org
	: www.rekamjejak.net
E-mail	: icw@antikorupsi.org
Twitter:	: @sahabaticw / @antikorupsi
Facebook	: Sahabat ICW
Instagram	: @sahabaticw

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

PENDAHULUAN 3

MENGEMBANGKAN DAN MEMPERKUAT KAPASITAS ORGANISASI 7

.MENGEMBANGKAN INOVASI BERBASIS DATA UNTUK

MEMFASILITASI PERAN SERTA MASYARAKAT 15

MEMPERLUAS GERAKAN ANTI-KORUPSI 17

ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK 19

PEMBELAJARAN 27

PENGHARGAAN ICW 29

LAPORAN KEUANGAN 30

STRATEGI 1

1.MENGEMBANGKAN DAN MEMPERKUAT KAPASITAS ORGANISASI

Melanjutkan agenda pada 2019 lalu, ICW berupaya mengembangkan dan memperkuat kapasitas organisasi pada tiga aras utamanya, yakni **kebijakan organisasi, pengelolaan sumber daya manusia dan finansial** untuk menopang gerakan anti-korupsi. Usaha pengembangan dan penguatan ICW sebagai institusi merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat tata kelola dan usaha menempatkan diri sebagai organisasi pembelajar.

Organisasi yang sehat, menurut banyak referensi ilmu manajemen, perlu terus belajar dari pengalamannya, baik yang merupakan kegagalan ataupun keberhasilan, untuk dapat beradaptasi terus menerus dengan lingkungannya yang cepat berubah. Harapannya, ICW akan menjadi lembaga yang beranjak dewasa, dimana ukuran-ukuran efisiensi, efektifitas, daya tahan finansial, relevansi, dan keberlanjutan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses monitoring, evaluasi dan pembelajarannya.

Foto:Dokumentasi ICW

1.1. PENGEMBANGAN KAPASITAS PERSONEL

Menyesuaian dengan tantangan yang selalu baru, sekaligus upaya regenerasi aktivis ICW yang berkelanjutan, agenda pengembangan kapasitas personel menarget berbagai pengetahuan dan ketrampilan baru yang perlu ditingkatkan. Selama periode 2020, setidaknya sudah ada sebelas jenis pelatihan yang diikuti oleh hampir sebagian besar staff ICW. Topiknya sangat beragam dan relevan, diantaranya;

Khusus untuk pelatihan cara memfasilitasi online training merupakan respon atas pandemi yang memaksa sebagian besar aktivitas dilakukan secara online, termasuk kegiatan pelatihan.

1.2. PENGUATAN DAYA TAHAN FINANSIAL

Dalam konteks organisasi masyarakat sipil yang modern, satu prasyarat yang dibutuhan untuk dapat terus bergerak adalah kemampuan bertahan dari sisi finansial. ICW menyadari bahwa ketergantungan pada satu dua lembaga donor akan menjadi bom waktu. Keikutsertaan ICW dalam program FIRE (Financial Innovation and Resilience) yang diprakarsai Ford Foundation (FF) memberikan perspektif baru mengenai daya tahan keuangan organisasi.

Beberapa perangkat baru, seperti dashboard kesehatan keuangan telah mulai digunakan ICW untuk mengukur tingkat ketergantungan finansial kepada lembaga donor. Disamping itu, strategi komunikasi eksternal untuk memperluas cakupan sumber pendanaan, serta mendorong investasi dalam produk yang tidak beresiko dan tetap memberikan nilai tambah pendapatan organisasi mulai dicoba. Harapannya, dalam kurun waktu satu hingga dua tahun kedepan, hasil investasi sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh organisasi.

Dalam agenda penggalangan dana publik, baik yang menyasar individu maupun korporasi, ICW terus melakukan usaha agar daftar supporter baru terus bertambah. Tantangan strategi penggalangan dana publik saat pandemi tentunya lebih besar. Beberapa supporter setia ICW harus mundur dari komitmennya karena faktor tekanan finansial. Demikian halnya korporasi saat ini lebih memprioritaskan penanganan pandemi dibandingkan memberikan dukungan bagi kegiatan lain. Merchandise yang saat normal memiliki pendapatan lumayan baik juga terpengaruh karena masyarakat mengubah prioritas belanjanya.

Dalam rangka mengantisipasi melambannya ritme penggalangan dana publik, ICW menyasar sektor yang lebih luas dengan mengembangkan pendekatan crowd funding. Tim penggalangan dana publik ICW telah memiliki satu website khusus, yakni https://sahabaticw.org/ yang memanfaatkan metode crowd funding, dan mengintegrasikannya dengan sistem merchandise, semacam market place kecil bagi kepentingan pemasaran dan transaksi merchandise secara online. Uji coba ini sudah dimulai pada 2020 dan hingga kini dalam pemantauan untuk melihat efektifitasnya.

TABEL JUMLAH AUTO DEBET TAHUN 2020

BULAN	JUMLAH
Januari	Rp. 26.638.888
Februari	Rp. 27.263.888
Maret	Rp. 26.630.555
April	Rp. 26.113.888
Mei	Rp. 28.488.888
Juni	Rp. 25.838.888
Juli	Rp. 24.963.888
Agustus	Rp. 26.588.888
September	Rp. 24.913.888
Oktober	Rp. 24.713.888
November	Rp. 24.388.888
Desember	Rp. 24.663.888
TOTAL	**Rp. 311.208.323**

TOTAL PENJUALAN MERCHANDISE TAHUN 2020

BULAN	JUMLAH
Januari	Rp. 300.000
Februari	Rp. 11.240.000
Maret	Rp. 1.060.000
April	Rp. 900.000
Mei	Rp. 300.000
Juni	Rp. 1.900.000
Juli	Rp. 3.115.000
Agustus	Rp. 3.945.000
September	Rp. 2.113.000
Oktober	Rp. 4.202.000
November	Rp. 1.702.000
Desember	Rp. 16.798.000
TOTAL	**Rp. 47.575.000**

TOTAL ONE TIME DONATION TAHUN 2020

BULAN	JUMLAH
Januari	Rp. 240.000
Februari	Rp. 100.000
Maret	Rp. 240.000
April	-
Mei	-
Juni	Rp. 100.000
Juli	Rp. 530.000
Agustus	Rp. 490.000
September	Rp. 1.000.000
Oktober	Rp. 170.000
November	Rp. 420.000
Desember	Rp. 4.000.000
TOTAL	**Rp. 7.290.000**

Foto:Dokumentasi ICW

1.3. PUSAT BELAJAR ANTI-KORUPSI

Center of excellence gerakan antikorupsi adalah salah satu ambisi ICW yang targetnya akan dicapai setidaknya pada 2022. Untuk mencapai tujuan ini, ICW memiliki empat agenda besar sekaligus yakni **pertama**, pembangunan rumah belajar anti-korupsi sebagai sarana untuk pengembangan kapasitas bagi jaringan dan pemangku kepentingan dalam gerakan anti-korupsi. **Kedua,** pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan anti-korupsi. **Ketiga,** pengembangan Akademi Anti-korupsi, platform pembelajaran online bagi masyarakat luas yang ingin belajar cara melawan korupsi, serta **keempat,** pengembangan kurikulum dan perluasan jangkauan Sekolah Anti-korupsi (SAKTI).

Sampai saat ini pembangunan rumah belajar anti-korupsi masih terus dilakukan. Targetnya proyek ini rampung pada akhir Desember 2021 dan akan mulai beroperasi sebagai Rumah Belajar Anti-korupsi pada awal Maret 2022. Penyelesaian pembangunan Rumah Belajar sedikit tersendat karena proses lelang yang harus diulang beberapa kali, jeda waktu menunggu lengkapnya dokumen perijinan pembangunan dan pandemi.

Sementara sistem pengelolaan pengetahuan masih fokus pada penguatan manajemen data dan MEL (Monitoring, Evaluation and Learning) untuk internal ICW. Jika sistem sudah beroperasi dengan baik, maka akses data dan informasi pengetahuan anti-korupsi akan dibuka kepada masyarakat luas.

Sementara itu, materi pembelajaran anti-korupsi pada Akademi Antikorupsi terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Berbagai kerjasama pemanfaatan Akademi telah dijajaki, termasuk yang sudah masuk dalam tahap pemanfaatan adalah PT Indonesia Power, salah satu BUMN anak perusahaan PLN yang telah menggunakan mata kuliah Korupsi Korporasi dan Pengantar Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Sedangkan kerjasama dengan kampus dilakukan dengan An-Nairy Aceh dan Universitas Raden Rahmat, Malang namun harus diakui belum ada aksi konkret yang bisa dilakukan bersama. Kerjasama lain adalah dengan KPU DKI Jakarta untuk mendorong pengarus-utamaan isu antikorupsi bagi penyelenggara pemilu.

> *Materi di Akademi Antikorupsi mengajari saya banyak hal yang dapat saya aplikasikan untuk mempromosikan gerakan anti-korupsi. Materinya sangat mudah diakses dan disampaikan dengan santai tetapi sangat mendalam dan disampaikan oleh ahli dalam gerakan anti-korupsi. Saya berharap lebih banyak lagi orang-orang yang bergabung dengan saya sebagai partisipan dari Akademi Anti-Korupsi.*
>
> **- Masbahur Roziqi, Guru Konseling, SMA 1 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur**

AKADEMI ANTIKORUPSI

Foto:www.akademi.antikorupsi.org

Sebagai gambaran umum, pengguna Akademi Antikorupsi sejak dilaunching pada pertengahan 2018 telah mencapai 11 ribu peserta. Khusus untuk 2020, total pengguna Akademi sebanyak 4.789 orang, dengan latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari ASN, swasta, aktivis, pegawai BUMN, mahasiswa dan pelajar. Mata kuliah yang diambil juga beragam sehingga memberikan kesempatan bagi peserta untuk memilih materi yang relevan dengan kebutuhannya.

Selain melalui Akademi Antikorupsi, sepanjang 2020 ICW telah melakukan 21 peningkatan kapasitas yang melibatkan 338 orang dengan latar belakang beragam, yakni jurnalis, kelompok masyarakat sipil, dan mahasiswa. Peningkatan kapasitas ini terdiri dari berbagai tema, diantaranya strategi kampanye bagi kelompok difabel, pemantauan bantuan sosial pengadaan barang dan jasa terkait Covid-19, dan keamanan digital bagi aktivis antikorupsi.

1.4. MEMPERKUAT ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK

Mengawasi dan mengkritisi kebijakan publik membutuhkan dasar argumentasi yang jelas dan kuat. ICW terus berusaha menggunakan fondasi yang kokoh dan data yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, berbagai kajian yang relevan secara konsisten telah dilakukan. Setidaknya selama 2020, ada beberapa kajian mendalam yang diproduksi, seperti analisa **Public Accountability Review (PAR) "Potensi Konflik Kepentingan Staff Khusus Presiden", kertas posisi "Problematika UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", briefing kebijakan "Pengadaan dimasa Pandemi Covid-19", kajian investigative "Polemik Platform Digital dan Lembaga Pra-kerja", laporan evaluasi "Kinerja KPK Desember 2019-Juni 2020", penelitian "Siapa dibalik PLU?", laporan penelitian "Berbagai Masalah Serius UU KPK Baru", kajian anggaran "Pengadaan Influencer", laporan hasil monitoring "Potensi Penyimpangan Bansos COVID-19", kajian "Pengadaan untuk Aktivitas Digital Polri", laporan "Eksaminasi Publik Putusan Kasus BLBI", laporan "Tren Korupsi" dan laporan "Tren Vonis Kasus Korupsi".**

Foto:Dokumentasi ICW

2. MENGEMBANGKAN INOVASI BERBASIS DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MEMFASILITASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

2.1. PENGEMBANGAN OPENTENDER.NET UNTUK PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKTOR PUBLIK

Salah satu intrumen yang terus dimutahirkan oleh ICW adalah opentender.net. Opentender.net merupakan platform pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Indikator penyimpangan (fraud) yang disebut sebagai red-flag berbasis sistem memudahkan siapapun untuk mengidentifikasi PBJ yang potensial dikorupsi. Para pengguna tinggal melakukan penelusuran lebih jauh temuan awal dalam Opentender.net untuk membuktikan indikasi korupsi yang terjadi.

Saat ini indikator fraud bertambah menjadi tujuh sebagai respon atas masukan dari LKPP, beberapa ahli pengadaan dan regulasi pengadaan baru agar analisa menjadi lebih akurat. Selain itu, dashboard Opentender.net juga diperbaharui untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memanfaatkan *tool* ini. Salah satu catatan penting dari evaluasi Opentender.net adalah, penting bagi ICW untuk lebih agresif dalam menjajakan Opentender.net kepada stakeholder agar penggunanya bertambah dan pemanfaatannya untuk mengawasi PBJ Pemerintah bisa lebih besar.

> *Opentender.net ICW telah sangat membantu kami dalam menentukan sampel proyek yang akan kami audit*
> - ***Lius Sam, Auditor di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur***

Foto: Dokumentasi ICW

> *Saya berharap karya-karya besar ICW, khususnya Opentender.net dapat dimanfaatkan secara luas oleh semua pihak – pemerintah, masyarakat sipil, jurnalis, akademisi, dan lainnya untuk mendorong pengambilan keputusan berbasis data dan mengubah pengadaan publik Indonesia menjadi lebih baik.*
>
> ***- Ben Fernz, the Regional Head of Asia Pacific at the Open Contracting Partnership***

Selain itu, dalam rangka mengawal proses Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilakukan secara serentak pada Desember 2020 di 270 daerah, ICW mendorong agar para pemilih dapat menimbang dengan sungguh-sungguh rekam jejak para calon kepala daerah. Melalui kanal Rekamjejak.net, ICW mengajak masyarakat pemilih untuk memilih calon kepala daerah yang memiliki integritas dan tidak memiliki catatan buruk terkait korupsi dan kejahatan serius lainnya.

2.2 MENGEMBANGKAN STRATEGI KAMPANYE

Situasi Covid-19 mendorong ICW untuk lebih kreatif menggunakan media sosial dan sarana daring lainnya dalam mengkampayekan nilai-nilai antikorupsi, ataupun untuk memperluas informasi mengenai apa yang dilakukan ICW untuk mendorong gerakan antikorupsi.

Pada 2020, ICW mulai menginisiasi pembuatan podcast melalui kanal Spotify dengan nama “Di Atas Meja by ICW”. Selain itu, ICW juga secara rutin melakukan diskusi publik secara daring dan webinar dengan berbagai tema, baik yang terkait dengan kerja pencegahan korupsi, advokasi antikorupsi maupun isu aktual yang disiarkan melalui Youtube, Facebook, maupun Instagram. Selain menggandeng narasumber yang mumpuni, kredibel, dan memiliki reputasi yang baik di bidangnya masing-masing, ICW juga melibatkan jaringan antikorupsi di berbagai daerah dalam kerja-kerja kampanye publik.

STRATEGI 2

1.MEMPERLUAS GERAKAN ANTIKORUPSI

1.1 BERJEJARING UNTUK MENGEMBANGKAN KELOMPOK ANTIKORUPSI

ICW sedari dulu meyakini bahwa gerakan antikorupsi tidak dapat dilakukan seorang diri, atau oleh satu dua organisasi saja. Oleh karena itu, ICW terus berupaya memperluas gerakan antikorupsi dengan terlibat dalam berbagai inisiatif bersama dalam bentuk koalisi, membangun kolaborasi, dan mendorong lahirnya kelompok-kelompok antikorupsi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Pada 2020, ICW aktif terlibat dalam koalisi Bersihkan Indonesia (BI) untuk mendorong pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam, khususnya batubara. Lebih lanjut, ICW juga terus mendukung Klub Jurnalis Investigasi (KJI) dengan melakukan peningkatan kapasitas dan melakukan pemantauan bersama. Salah satu hasil pemantauan yang dilakukan bersama adalah catatan kritis dan potensi korupsi dalam program ambisius, kartu pra-kerja.

ISelain itu, kolaborasi yang dilakukan bersama organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional maupun daerah, diantaranya pemantauan bantuan sosial dan pengadaan barang terkait penanganan Covid-19 yang dilakukan di 11 daerah. Mengingat korupsi dirasakan dampaknya oleh berbagai lapisan masyarakat, ICW juga mulai berjejaring dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk mengembangkan program edukasi antikorupsi bersama bagi kelompok masyarakat adat. Dari kolaborasi ini, telah tersedia satu materi Pendidikan Antikorupsi bagi Masyarakat Adat yang dapat diakses melalui Akademi Antikorupsi.

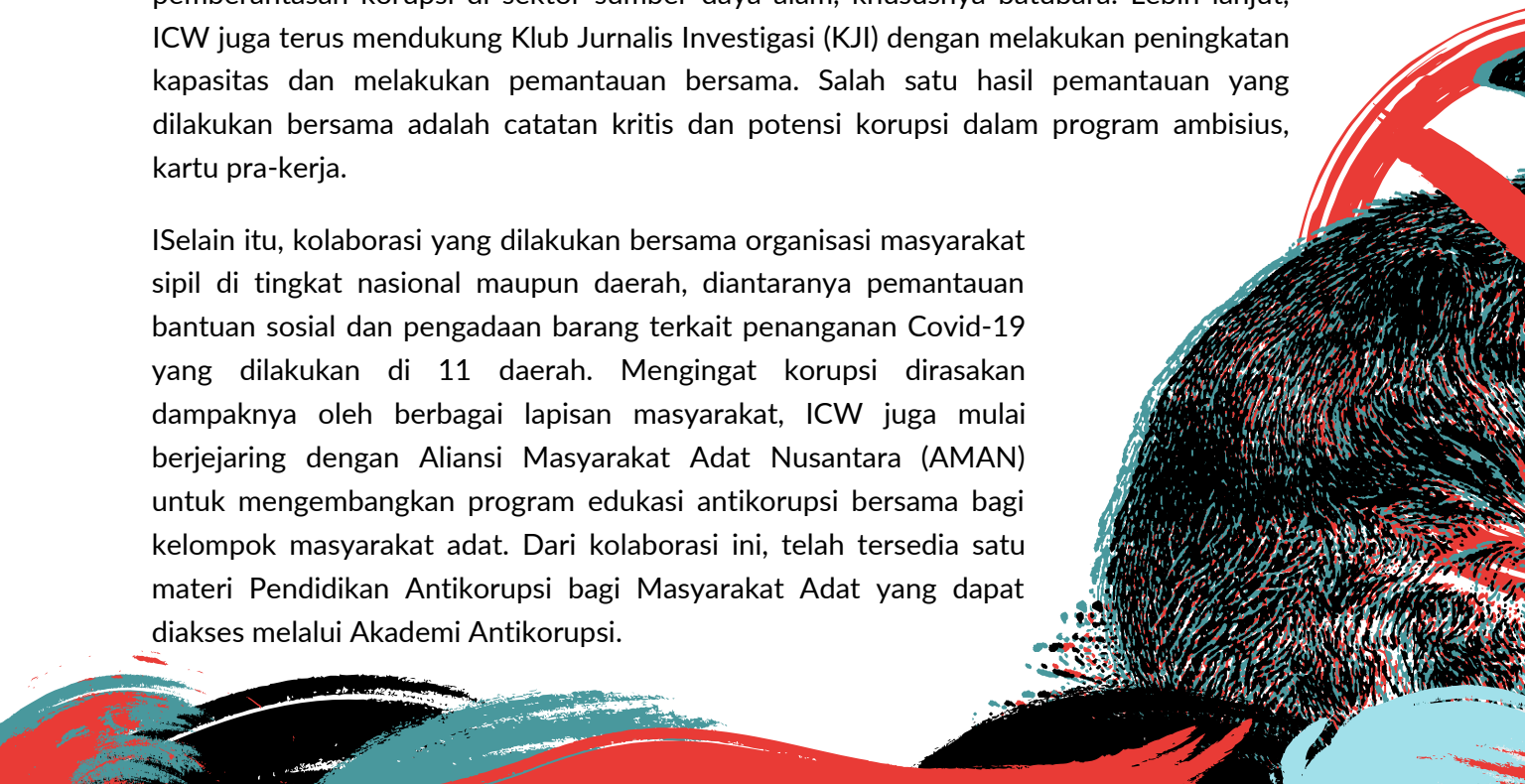

Kolaborasi bersama jaringan masyarakat sipil lain juga dilakukan dalam rangka mengawal proses seleksi pejabat publik. Pada 2020, bersama dengan Koalisi MP3 (Masyarakat Pemantau Pelayanan Publik), ICW ikut terlibat dalam melakukan penelusuran rekam jejak calon komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) serta menyampaikan hasil temuan lapangan kepada panitia seleksi (Pansel).

Selanjutnya, ICW mengembangkan jangkauan kelompok masyarakat yang bisa dirangkul untuk terlibat aktif melawan korupsi dengan menggandeng organisasi masyarakat disabilitas. Kelompok ini merupakan lapisan masyarakat yang rentan karena sedikit memiliki akses terhadap pengambilan keputusan publik. Disamping itu, mereka juga rentan menjadi korban korupsi. Misalnya menjadi korban pemerasan saat meminta layanan administrasi kependudukan, menjadi sasaran penyunatan anggaran bantuan sosial karena minimnya pengetahuan dan kapasitas untuk melawan korupsi.

Oleh karena itu, ICW bersama dengan jaringan organisasi kelompok disabilitas di Makasar (PERDIK), Kupang (Bengkel Apek), Solo (PPRBM) dan Bandung (BILIC) membangun kolaborasi untuk bertukar pengetahuan dan ketrampilan. Pada satu sisi ICW belajar bagaimana strategi berkomunkasi yang tepat dengan kelompok disabilitas, mengetahui lebih jauh kebutuhan dasar mereka, pada sisi yang lain jaringan di empat daerah ini mendapatkan berbagai pengetauan baru mengenai korupsi dan strategi pemberantasannya, masalah pelayanan publik, hingga bagaimana membaca dokumen anggaran serta menyusun usulan kebijakan publik. Hasilnya lumayan menjanjikan, karena BILIC Bandung sudah sampai pada kemampuan menyusun rancangan peraturan daerah yang ramah terhadap masyarakat disabilitas. Mereka juga sudah mulai aktif terlibat dalam kampanye anti-korupsi.

STRATEGI 3

1.ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK

> *Korupsi bukan hanya kejahatan luar biasa, tetapi juga musuh nyata bagi suatu bangsa dan rakyatnya. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, ICW memiliki posisi yang baik untuk berada di garis depan dan melawan musuh ini. Saya tidak hanya mendukung ICW, saya juga bagian dari organisasi.*
>
> - ***Prof. Atip Latipulhayat, SH, LL.M, Ph.D (Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran/Ketua Jurusan Hukum Universitas Padjadjaran)***

Foto: Dokumentasi ICW

1.1. JUDICIAL REVIEW UU KPK NO 19 TAHUN 2019

Setelah Pemerintah dan DPR RI mengundangkan secara resmi UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK, sebagai hasil revisi atas UU No 30 Tahun 2002, ICW bersama dengan koalisi masyarakat sipil antikorupsi lainnya, yakni PSHK, Kode Inisiatif, LBH Jakarta dan YLBHI menyusun dan mengajukan gugatan Judicial Review UU No 19 Tahun 2019.

Sebelum gugatan diajukan, ICW bersama PSHK secara intensif melakukan penelitian atas proses penyusunan UU KPK No 19 Tahun 2019 untuk melihat berbagai persoalan, baik dari sisi prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan maupun dari sisi substansi pengaturannya. Hasil dari penelitian tersebut telah dibahas dengan melibatkan para akademisi di beberapa kampus, seperti Universitas Lampung, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada dan Universitas Khatolik Parahyangan. Temuan-temuan penting dalam penelitian tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari bahan utama gugatan Judicial Review ke MK.

1.2. MENGGUGAT UU MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada awal November tahun 2020, ICW bersama Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, serta Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas mengajukan uji formil dan materiil terhadap revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Langkah ini dilakukan mengingat produk hukum tersebut menuai segudang permasalahan, mulai dari tiadanya partisipasi publik, dilaksanakan secara tergesa-gesa, hingga Naskah Akademik yang sekadar formalitas belaka.

Tidak hanya itu, proses perubahan UU MK juga dilakukan oleh Pemerintah dan DPR di tengah proses pengujian UU lain di MK. Sehingga, muncul kekhawatiran publik bahwa RUU ini dijadikan ajang tukar kepentingan antara pembentuk UU dengan MK itu sendiri. Sebab, muatan RUU ini hanya terkait dengan perpanjangan masa jabatan Hakim Konstitusi.

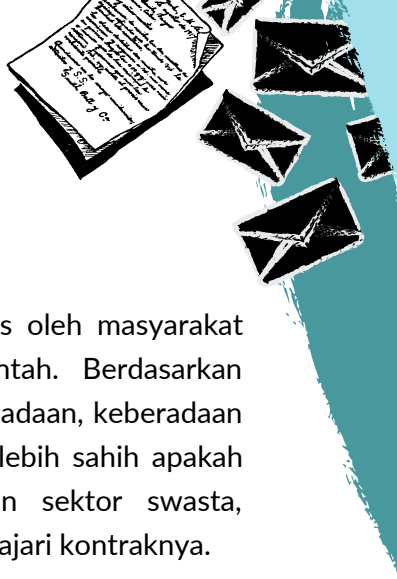

1.3. MENDORONG KETERBUKAAN KONTRAK DALAM REGULASI KOMISI INFORMASI PUSAT

Salah satu dokumen publik yang penting untuk dapat diakses secara luas oleh masyarakat adalah dokumen kontrak dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Berdasarkan pengalaman dalam melakukan penelusuran atas potensi korupsi sektor pengadaan, keberadaan dokumen kontrak kerap menjadi kendala. Pasalnya, untuk menguji secara lebih sahih apakah ada kongkalingkong, permainan dan kolusi antara pemerintah dengan sektor swasta, masyarakat yang mengawasi pengadaan harus dapat mengakses dan mempelajari kontraknya.

Oleh karena itu, agar fungsi pengawasan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan lebih efektif, pada 2020 ICW memberikan masukan dalam revisi peraturan standar pelayanan informasi publik Komisi Informasi Pusat (PerKIP). Dalam proses menyusun usulan peraturan tersebut, ICW bersama-sama dengan LKPP dan KIP telah berdiskusi secara intens agar rumusan usulan peraturan telah benar-benar mempertimbangkan berbagai aspeknya.

> PADA INTINYA, ICW MENDORONG AGAR DOKUMEN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DIMASUKKAN SEBAGAI DOKUMEN TERBUKA YANG HARUS DISEDIAKAN. USULAN DRAFT PERKIP YANG DIAJUKAN OLEH ICW TELAH DITERIMA OLEH KIP DAN SAAT INI SEDANG MENUNGGU PROSES HARMONISASI PERATURAN DI KEMENHUMHAM

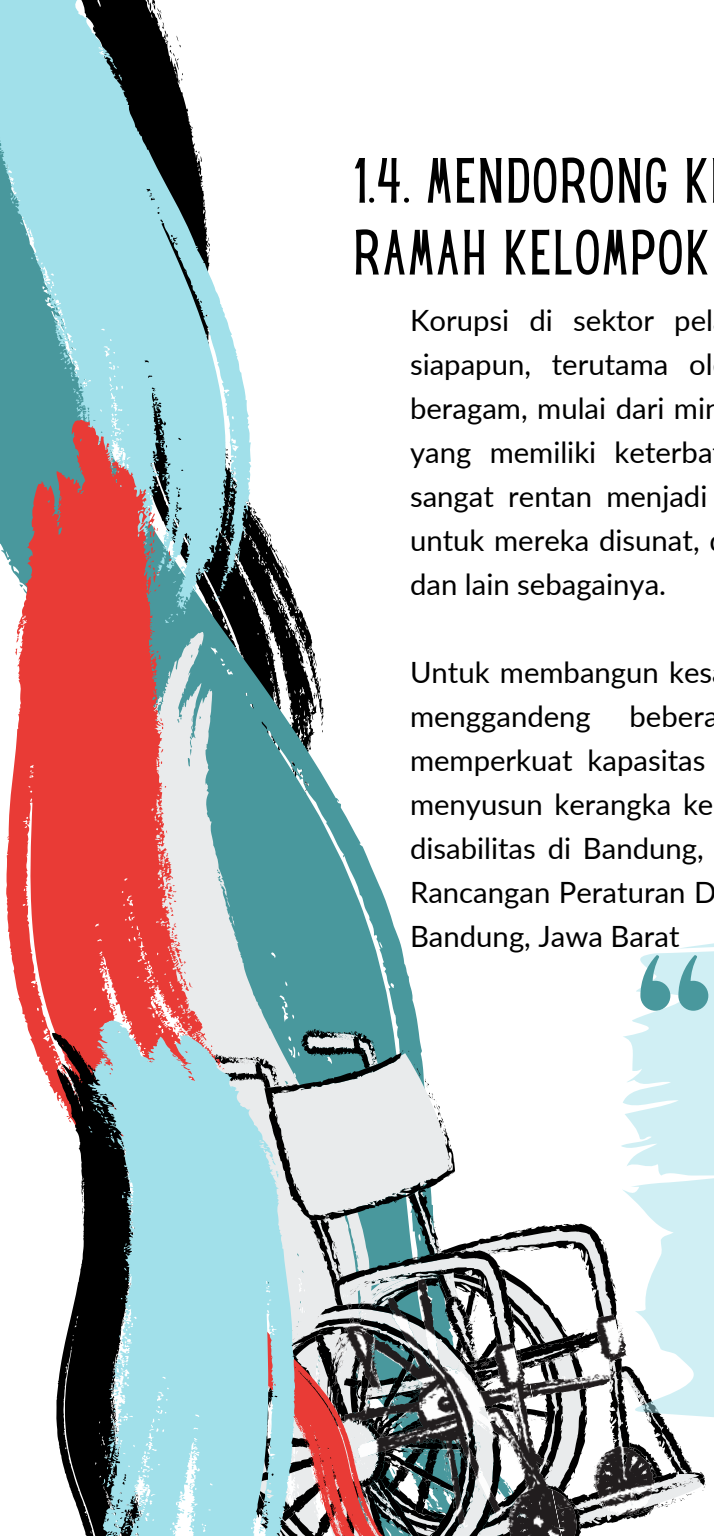

1.4. MENDORONG KEBIJAKAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK DISABILITAS

Korupsi di sektor pelayanan publik dapat dirasakan dampaknya oleh siapapun, terutama oleh kelompok minoritas. Kelompok minoritas ini beragam, mulai dari minoritas karena faktor SARA, ataupun karena mereka yang memiliki keterbatasan seperti kelompok disabilitas. Kelompok ini sangat rentan menjadi korban korupsi. Misalnya alokasi anggaran APBD untuk mereka disunat, dana bantuan dipotong atau bahkan tidak diberikan dan lain sebagainya.

Untuk membangun kesadaran kelompok rentan akan bahaya korupsi, ICW menggandeng beberapa organisasi masyarakat disabilitas dalam memperkuat kapasitas mereka, termasuk dalam membaca anggaran dan menyusun kerangka kebijakan publik. Bersama dengan jaringan kelompok disabilitas di Bandung, BILIC, telah disampaikan rekomendasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung, Jawa Barat

> *Dengan dukungan ICW, kami dapat belajar tentang anti korupsi dan bagaimana mengakses informasi publik seperti penganggaran publik untuk penyandang disabilitas, serta bagaimana mengadvokasi kebijakan dengan menggunakan bukti.*
> *Saat ini kami sudah mulai mensosialisasikan gerakan antikorupsi di Bandung kepada Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO) lainnya dan pemerintah,*
> ***- Yuyun Yuningsih, Direktur Bandung Independent Living Center (BILiC), Organisasi Penyandang Disabilitas***

1.5. MEMBONGKAR CELAH KORUPTIF KEBIJAKAN KARTU-PRAKERJA

Program Kartu Pra-Kerja merupakan salah satu program kontroversial yang menyulut perdebatan panjang. Pemerintah menggunakan dalil pandemi dalam menetapkan program kartu pra-kerja sebagai bantuan sosial (bansos). Karena alasan ini pula, penunjukan langsung vendor/penyedia/pihak ketiga dalam pelaksanaan program kartu pra-kerja dianggap tidak menyalahi aturan dalam pengadaan barang dan jasa karena rezim pengadaan barang dan jasa tidak mengatur soal belanja untuk bansos pemerintah.

Lazimnya, karena bansos adalah bantuan langsung dari pemerintah ke masyarakat terdampak, tidak ada pihak ketiga yang menjadi perantara. Oleh karena itu, tidak perlu ada pengaturan soal tender. Namun ternyata, bansos model kartu pra-kerja tetap menggunakan pihak ketiga sebagai pelaksana program. Inilah titik rawan pertama yang disoroti oleh ICW dan media massa nasional. Sementara itu, dalam ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian selaku induk semang program kartu pra-kerja, telah ditetapkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang dapat dinikmati langsung oleh vendor melalui skema pelatihan daring. Hal ini yang kemudian oleh ICW berpotensi menabrak berbagai macam ketentuan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Apalagi, salah satu vendor yang ditunjuk ternyata dikomandoi oleh salah satu staff khusus Presiden.

Oleh karena prosesnya gelap, ICW mendesak Pemerintah cq Kemenko Perekonomian untuk membuka kontrak kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan program kartu pra-kerja. Melalui proses yang panjang untuk meminta informasi publik, hingga sampai ke sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat (KIP) hingga ke putusan kasasi di tingkat MA, ICW gagal mendapatkan dokumen kontrak dimaksud. Ini justru menambah kecurigaan, bahwa ada sesuatu dibalik kontrak kerjasama tersebut.

Karenanya, ICW kemudian mengembangkan strategi advokasi kebijakan program kartu-prakerja, dengan menyampaikan berbagai persoalan mal-administrasi dalam penyusunan kebijakan kartu pra-kerja kepada Ombusdman Republik Indonesia. Pelaporan itu dimaksudkan agar ORI dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut potensi mal-administrasinya. Namun ORI menolak laporan tersebut karena ICW dianggap tidak memiliki legal standing. Namun ORI menyatakan bahwa bahan laporan dari ICW menjadi referensi tambahan dalam investigasi mandiri mereka. Hanya saja, hingga Komisioner ORI berganti, belum ada putusan apapun, atau hasil final dari investigasi mandiri yang dilakukan ORI.

1.6. MENJAGA MARWAH INTEGRITAS KPK

Foto: Dokumentasi ICW

KPK dibawah kepemimpinan Firli Bahuri melahirkan berbagai kontroversi. Termasuk ancaman baru terhadap marwah integritas KPK. Hal itu setidaknya ditunjukkan dari beberapa kebijakan Firli Bahuri yang tidak transparan, dan bahkan cenderung melemahkan KPK. Salah satu hal yang kemudian dikritisi oleh ICW adalah sikap para insan KPK dalam menjunjung kode etik dan kode perilaku KPK, dimana Ketua KPK, Firli Bahuri justru menjadi salah satu orang yang dilaporkan oleh ICW karena indikasi pelanggaran kode etik. Hal ini tidak termasuk laporan yang disampaikan oleh MAKI atas dugaan penggunaan helikopter mewah yang kemudian terbukti di Dewas sehingga Firli Bahuri dikenakan sanksi etik ringan.

Indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri adalah masalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). ICW melihat bahwa keputusan OTT KPK di UNJ sangat dikendalikan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, padahal sejak awal patut diduga bahwa indikasi adanya penyelenggara negara yang terlibat tidak ada sehingga bukan domain KPK untuk menindak. Meskipun pada akhirnya hal itu terbukti sehingga KPK harus melimpahkan berkas perkara OTT UNJ tersebut ke Kepolisian,namun atas laporan indikasi pelanggaran kode etik ICW tersebut, Dewas memutuskan tidak ada indikasi pelanggaran kode etik. ICW menilai putusan Dewas sangat janggal karena seakan-akan tidak menggunakan fakta lapangan dalam mengambil keputusan.

1.7. MENOLAK UU BERMASALAH

Dalam periode 2020, setidaknya ada beberapa regulasi bermasalah yang lolos dalam proses pembahasan antara Pemerintah dan DPR. Salah satunya yang menyita perhatian luas masyarakat adalah UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. UU ini memangkas berbagai macam rambu-rambu penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama dari kemungkinan eksploitasi yang berlebihan dan serakah oleh para pengusaha. Selain itu, ada kesan umum bahwa dengan menghapus beberapa aturan main yang penting dalam pengelolaan sumber daya alam, ada praktek lancung yang dilegalkan.

ICW bersama-sama dengan koalisi masyarakat sipil dan kelompok buruh secara resmi melakukan penolakan dengan melakukan serangkaian advokasi. Selain terlibat dalam aksi-aksi lapangan, ICW turut serta dalam melakukan kajian khusus atas substansi UU Cipta Kerja di sektor batubara. Hal ini mengingat dalam UU tersebut dicantumkan beberapa ketentuan yang membebaskan pembayaran royalti batubara hingga 0% dengan prasyarat tertentu. Padahal struktur bisnis batubara di Indonesia dikuasai oleh segelintir oligarkhi. Dengan masuknya pasal tersebut, ada keuntungan ganda bagi para pengusaha batubara. Namun demikian, seperti juga upaya advokasi atas kebijakan legislasi lain yang bermasalah, UU Cipta Kerja tetap disetujui dan telah resmi berlaku.

Foto: Dokumentasi ICW

PEMBELAJARAN

Meskipun pandemi COVID-19 membuat ruang gerak fisik dan mobilitas untuk menjalankan kerja-kerja antikorupsi menjadi terbatas, namun masyarakat sipil dituntut untuk cepat beradaptasi dengan situasi baru. Apalagi pandemi COVID-19 tidak dapat diprediksi kapan berakhirnya. Adaptasi itu termasuk bagaimana mengubah kerja luring menjadi daring, termasuk dalam kerja-kerja pengawasan masyarakat. Selain itu, mengingat salah satu 'bisnis' ICW adalah pemberdayaan warga, dimana berbagai pelatihan dilakukan secara reguler, maka dibutuhkan proses adaptasi cepat untuk menyelenggarakan pelatihan secara online yang tetap menyegarkan, tidak membuat peserta bosan dan tetap kreatif dengan berbagai metode.

Dari sisi pengembangan sumber daya finansial, tantangan serupa juga dirasakan. Tim fund-raising ICW dituntut untuk mengubah format dan metode *public fund raising* agar kontribusi masyarakat dalam menyokong kerja-kerja advokasi antikorupsi dan pemberdayaan masyarakat tetap dapat diupayakan. Karena tatap muka sangat dibatasi, ICW menggeser haluan ke pemanfaatan sarana digital untuk mengajak masyarakat tetap terlibat aktif melawan korupsi, termasuk dengan memberikan donasi. Potensi *crowd funding* sebagaimana yang dilakukan kitabisa.com sebagai contoh juga diadopsi. Termasuk penjualan merchandise dengan memanfaatkan sistem market-place dan berkolaborasi dengan penyedia jasa market-place yang sudah dikenal luas masyarakat.

Pada hal lain, ICW dan kelompok masyarakat sipil lainnya menyaksikan kemunduran demokrasi yang dapat dilihat dari berbagai kebijakan publik yang kontra-produktif dengan upaya pemberantasan korupsi. Seperti lahirnya UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK, pengesahan UU Cipta Kerja dan UU Minerba yang mencerminkan konsolidasi kekuatan oligarki ekonomi dan politik. Pada saat yang sama, *pressure group* semakin lemah sehingga kebijakan kontroversial dapat lolos dengan mudah.

Sentimen elit politik nasional yang tidak merestui pemberantasan korupsi menyadarkan ICW untuk harus lebih aktif menyasar dan memberdayakan kelompok - kelompok masyarakat agar terlibat dalam usaha pemberantasan korupsi. Seperti mendorong lahirnya kelompok jurnalis investigasi, memperluas jaringan ke kelompok masyarakat adat, organisasi dan kelompok masyarakat disabilitas, anak muda di Papua dan Papua Barat maupun mahasiswa di berbagai universitas untuk membangun kekuatan p*ressure group*. Kedepan, pemberdayaan kelompok masyarakat untuk mmbangun kembali kekuatan gerakan antikorupsi, baik di tingkat lokal maupun nasional akan menjadi prioritas ICW.

Kemunduran demokrasi juga dapat disaksikan dari berbagai serangan balik, intimidasi dan serangan digital pada kerja-kerja advokasi antikorupsi yang dilakukan ICW, akademisi dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Kasus yang paling kentara adalah serangan digital pada akun sosial media organisasi maupun akun sosial media aktivis, dan serangan digital pada forum-forum diskusi daring. Dengan situasi baru yang makin mengancam peran strategis masyarakat sipil dalam mengawasi pemerintah, ICW menyadari pentingnya penguatan pada sistem keamanan digital. Berbagai pelatihan telah dilakukan, termasuk dengan membuat SOP keamanan digital, melakukan audit keamanan digital standar, dan membangun kolaborasi serta jejaring dengan kelompok dan para ahli di sektor keamanan digital.

> *Saya sangat bangga berkontribusi pada gerakan sosial dan keadilan. Saya tidak perlu berpikir dua kali ketika kesempatan itu datang. Kolaborasi saya dengan ICW sangat berkesan dan saya bangga dengan hasil kerja sama kita.*
> *Bekerja dengan tim ICW, yang anggotanya menyenangkan dan profesional, merupakan pengalaman yang tak terlupakan dan saya senang memiliki jaringan baru di bidang ini.*
> - ***Karlina Satrioputri, Seniman/Creativepreneur***

PENGHARGAAN ICW

INDONESIA FUND-RAISING AWARD (IFA) 2020

ICW meraih penghargaan ini untuk **kategori Fund-Raising Program Anti-korupsi Terbaik**. Menurut panitia penyelenggara, ICW telah aktif memberdayakan masyarakat untuk aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. Sumber: Institute Fund-Raising Indonesia (IFI).

GLOBAL GO TO THINK TANK INDEX

ICW menduduki posisi 27 dari 67 organisasi **"Top Transparancy and Good Governance Think Tanks".**

Sumber: The Lauder Institute, Pensylvannia University, USA.

GLOBAL GO TO THINK TANK INDEX

IICW menempati **peringkat 63 "Global Go To Think Tank Index" tahun 2020** dari 109 organisasi global. Posisi tersebut naik dua peringkat dari 65 pada tahun 2019 untuk **kategori "Think Tank to Watch".**

LAPORAN AUDIT KEUANGAN ICW 2020

ASET

ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	Rp.	11,343,153,926
Piutang	Rp.	2,898,934,087
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka	Rp.	1,614,419,411
Jumlah Aset Lancar	Rp.	15,858,507,424
ASET TIDAK LANCAR		
Investasi	Rp.	1,060,000,000
Aset Tetap		
Harga Perolehan	Rp.	7,558,494,129
Dikurangi: Akm Penyusutan	Rp.	(1,806,079,186)
Nilai Buku	**Rp.**	**5,752,414,943**
Jumlah Aset Tidak Lancar	**Rp.**	**6,812,414,943**
JUMLAH ASET	**Rp.**	**22,670,922,367**

LIABILITAS DAN ASET NETO

LIABILITAS LANCAR		
Liabilitas lancar	Rp.	4,889,341,760
Jumlah Liabilitas Lancar	Rp.	4,889,341,760
Jumlah Liabilitas	Rp.	4,889,341,760
ASET NETO		
Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Rp.	16,009,554,458
Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Rp.	1,772,026,149
Jumlah Aset Neto	**Rp.**	**17,781,580,607**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET NETO	**Rp.**	**22,670,922,367**

TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA

PENDAPATAN		
Pendapatan Operasional	Rp.	3,502,377,179
Jumlah Pendapatan	Rp.	3,502,377,179
BEBAN		
Beban Operasional	Rp.	4,695,924,764
Jumlah Beban	Rp.	**4,695,924,764**
(DEFISIT)/SURPLUS	**Rp.**	**(1,193,547,585)**

DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA

PENDAPATAN		
Penerimaan Dana dari Grantor	Rp.	7,396,819,444
Pendapatan Bunga	Rp.	39,536,069
Jumlah Pendapatan	**Rp.**	**7,436,355,513**
BEBAN		
Beban Program	Rp.	8,014,653,949
Pengembalian Dana	Rp.	85,009,655
Beban Bunga	Rp.	13,939,140
Jumlah Beban	**Rp.**	**8,113,602,744**
DEFISIT	**Rp.**	**(677,247,231)**
JUMLAH DEFISIT	**Rp.**	**(1,870,794,816)**

ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA

Saldo Awal	Rp.	1 7,122,414,020
Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan	Rp.	(1,193,547,585)
Koreksi Aset Neto Tahun Lalu	Rp.	80,688,022
Saldo Akhir	**Rp.**	16,009,554,457

ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA

Saldo Awal	Rp.	2,371,309,924
Defisit Tahun Berjalan	Rp.	(677,247,231)
Koreksi Aset Neto Tahun Lalu	Rp.	77,963,457
Saldo Akhir	**Rp.**	**1,772,026,150**
JUMLAH ASET NETO	**Rp.**	**17,781,580,607**

Aliran Kas dari Aktivitas Operasi		
Penurunan Aset Bersih	Rp.	(1,870,794,816)
Penyesuaian untuk Merekonsiliasi Kenaikan/(Penurunan) Aktiva Bersih Menjadi Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasional		
- Penyesuaian Aset Bersih	Rp.	158,741,479
- Penyusutan	Rp.	400,938,699
Perubahan Modal Kerja:		
Piutang	Rp.	(2,019,432,482)
Uang Muka	Rp.	(388,831,879)
Kewajiban	Rp.	2,512,656,888
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	**Rp**	**(1,206,722,111)**
Aliran Kas dari Aktivitas Investasi:		
Penambahan Aset tetap	Rp.	(28,694,000)
Aliran Kas Dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	(1,060,000,000)
Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas	**Rp.**	**(2,295,416,111)**
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	Rp.	**13,640,570,037**
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**Rp.**	**11,345,153,926**

Untuk lebih lengkapnya, silahkan unduh/lihat laporan audit keuangan ICW 2020 melalui https://www.antikorupsi.org/id/laporan-keuangan

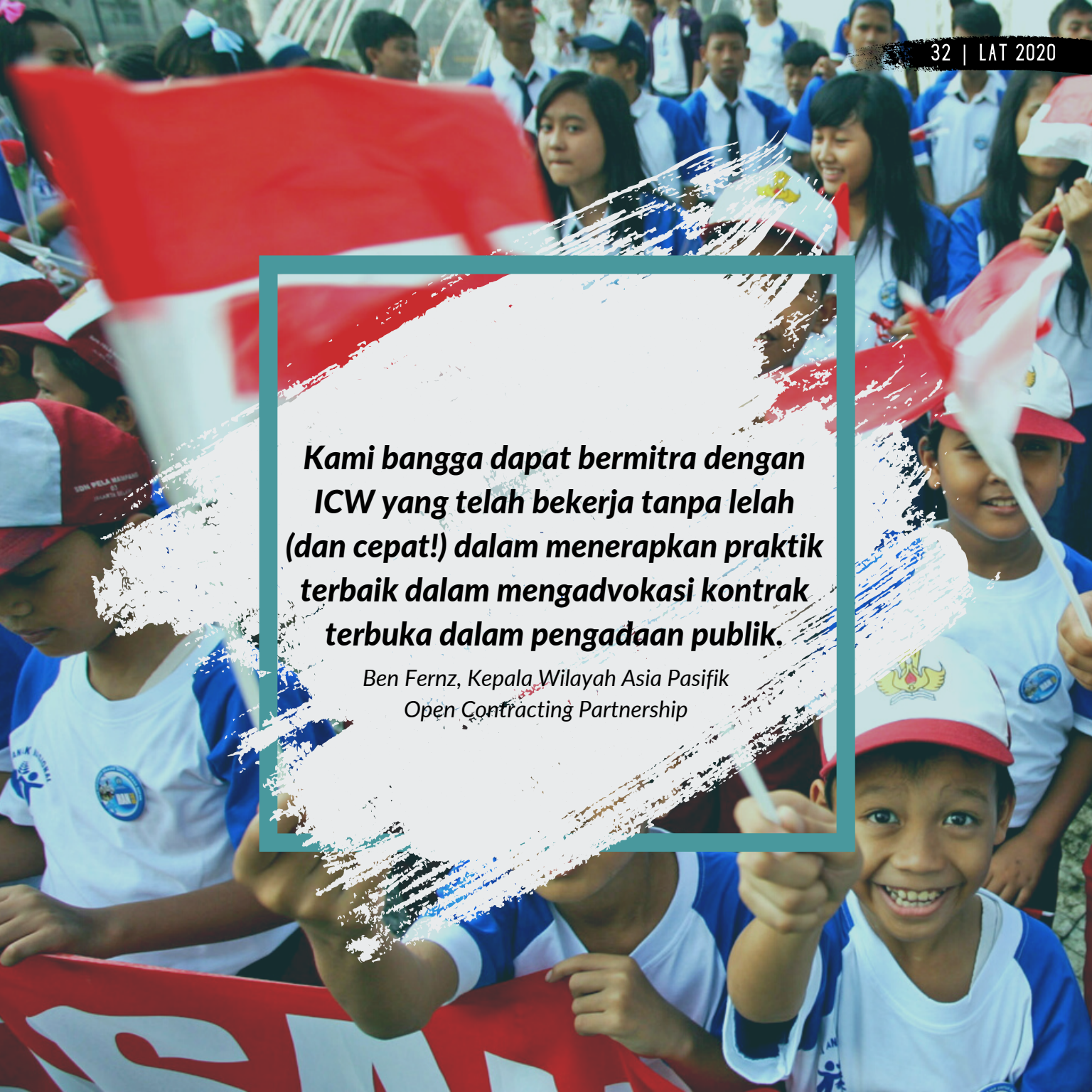

Kami bangga dapat bermitra dengan ICW yang telah bekerja tanpa lelah (dan cepat!) dalam menerapkan praktik terbaik dalam mengadvokasi kontrak terbuka dalam pengadaan publik.

Ben Fernz, Kepala Wilayah Asia Pasifik
Open Contracting Partnership

INDONESIA CORRUPTION WATCH

Laporan Tahunan 2020

Jln, Kalibata Timur 4D No. 6
Kalibata,
Jakarta Selatan